

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KARENA MALADMINISTRASI MELALUI OMBUDSMAN

Oleh

MELISA RATNA SARI

Penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa karena Maladministrasi melalui Ombudsman ini bertujuan untuk menganalisa tentang kebenaran adanya maladministrasi dalam kasus Pemberhentian Perangkat Desa Buah Berak Lampung Selatan, yang sudah dipastikan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung bahwa memang terdapat penyimpangan prosedur dan ditemukannya Maladministrasi. Maladministrasi telah diatur di dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dimana termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Akibat dari kelalaian dari Kepala Desa inilah yang para perangkat desa merasa dirugikan dan kurang nya mendapat perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan menggunakan sistem wawancara kepada informan yang berasal dari Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis campuran yaitu deskriptif dan kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung sudah efektif dalam menjalankan fungsi nya dalam menjaga transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, sebagai lembaga independen setiap hasil pemeriksaan dari laporan yang diterima oleh Ombudsman memiliki penyelesaian yang berbeda-beda. Oleh karena itu kekuatan hukum dari setiap hasil nya pun berbeda. Meskipun demikian rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ombudsman memiliki kekuatan moralitas yang bertujuan untuk mempengaruhi para pelayanan publik agar dapat mematuhi rekomendasi tersebut.

Kata Kunci : Pemberhentian, Perangkat Desa, Ombudsman

ABSTRACT

SETTLEMENT OF DISPUTES OF TERMINATION OF VILLAGE EQUIPMENT DUE TO MALADMINISTRATION THROUGH THE OMBUDSMAN

By

MELISA RATNA SARI

The research entitled Dispute Resolution of Dismissal of Village Officials due to Maladministration through the Ombudsman aims to analyze the truth of maladministration in the case of Dismissal of Buah Berak Village Officials in South Lampung, which has been confirmed by the Ombudsman Representative for Lampung Province that there were indeed procedural irregularities and maladministration was found. Maladministration has been regulated in Law No. 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia, which includes negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services carried out by state administrators and the government. As a result of the village head's negligence, village officials felt disadvantaged and lacked legal protection.

This study uses an empirical juridical approach. Data collection was carried out using an interview system with informants from the Ombudsman Representative Office for Lampung Province. Data processing in this study uses mixed analysis, namely descriptive and quantitative.

The results of this study indicate that the Lampung Province Representative Ombudsman Institution has been effective in carrying out its functions in maintaining transparency, accountability and justice in government administration. However, as an independent institution, each examination result of a report received by the Ombudsman has a different resolution. Therefore the legal force of each result is different. Even so, the recommendations from the results of the Ombudsman's examination have the power of morality which aims to influence public services so they can comply with these recommendations.

Keywords: Termination, Village Officials, Ombudsman